

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Sejak tahun 2011, data laju inflasi Kota Tanjungbalai tidak tersedia karena Kota Tanjungbalai tidak termasuk dalam daerah yang dihitung laju inflasinya secara nasional, dimana untuk Sumatera Utara ada 8 (delapan) daerah yang dihitung laju inflasinya secara nasional yaitu Sibolga, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Medan, Padang Sidempuan, Labuhan Batu, Karo dan Deliserdang. Kota Tanjungbalai untuk sementara menggunakan data inflasi daerah yang berdekatan yaitu Kota Pematang Siantar.

Pada triwulan IV untuk wilayah Kota Tanjungbalai ketersediaan stok masih mencukupin dan ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan daging ayam. Kenaikan harga komoditas ini disebabkan karena tingginya permintaan pada momen HBKN Nataru.

Dari berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai tercatat perkembangan inflasi yang berdasarkan dari Kota Pematang Siantar sebagai kota yang menjadi penghitungan IHK (Indeks Harga Konsumen) sehingga Kota Tanjungbalai pada Bulan Oktober tercatat 0,39% (mtm), 3,03% (yoy), 1,97% (ytd) sedangkan untuk inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat 0,13% (mtm), 1,59% (yoy), 0,59% (ytd) dan untuk inflasi nasional berada pada 0,08% (mtm), 1,71 (yoy), 0,82% (ytd). Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada Bulan Oktober yaitu daging ayam, tomat, sigaret kretek mesin, bawang merah dan cabai merah. Inflasi pada Bulan November 0,41% (mtm), 3,06% (yoy), 2,39% (ytd) dengan komoditas penyumbang inflasi yaitu tomat, bawang merah, emas perhiasan dan ikan dencis sedang penyumbang deflasi terbesar yaitu cabai merah, daging ayam ras, bayam dan cabai hijau. Pada Bulan Desember inflasi tercatat 0,46% (mtm), 2,86% (yoy) dan 2,86% (ytd). Komoditas dengan andil inflasi terbesar yaitu daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, minyak goreng dan sawi hijau sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu tomat, andaliman, beras, jeruk dan alpukat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah di Kota Tanjungbalai yang perlu ditindak lanjuti dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Luas lahan pertanian yang sangat sedikit dan bukan daerah penghasil produksi pertanian sehingga masih membutuhkan pasokan dari daerah lain terutama dari daerah Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Karo.
2. Kondisi infrastruktur pasar-pasar tradisional yang belum cukup baik sehingga mengganggu kelancaran distribusi barang terutama komoditi pangan, hal ini juga bisa mempengaruhi ketersediaan pasokan yang ada di pasar-pasar tradisional.
3. Belum terjalinnya Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil komoditi pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota

Tanjungbalai periode Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan pemantauan harga secara rutin ke pasar-pasar tradisional dan ritel modern untuk mencegah terjadinya penimbunan dan memastikan ketersediaan pasokan bahan-bahan pangan di Kota Tanjungbalai terutama Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
 2. Melakukan sidak pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bersama dengan unsur Forkopimda Kota Tanjungbalai.
 3. Melakukan monitoring ke pangkalan-pangkalan tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk mengecek penyaluran tabung gas elpiji kepada masyarakat agar tersalur dengan baik dan dijual dengan harga het.
 4. Menjamin lancarnya pasokan komoditas bahan-bahan pokok kepada masyarakat dan menjamin lancarnya penyaluran bantuan pangan beras kepada KPM di Kota Tanjungbalai.
 5. Melaksanakan kegiatan Pasar Murah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustriaan Kota Tanjungbalai terutama menjelang HBKN Nataru.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keberhasilan pencapaian pengendalian inflasi pada triwulan IV ini dikarenakan terpenuhinya pasokan bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat Kota Tanjungbalai walaupun terjadi fluktuasi dan kenaikan harga bahan-bahan pokok yang cukup signifikan. Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diarahkan untuk menjaga kelancaran pasokan bahan-bahan pokok baik dari sisi produksi maupun distribusi yang meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi ekspektasi.

Selain itu, untuk mengendalikan inflasi di daerah khususnya Kota Tanjungbalai telah dilakukan berbagai upaya oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi kedepannya diantaranya :

1. Kurangnya pelaksanaan rapat-rapat rutin bersama tim mengenai permasalahan pengendalian inflasi dan solusi yang harus diambil apabila terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan.
 2. Pelaksanaan kegiatan High Level Meeting (HLM) untuk kedepannya sebaiknya dilaksanakan setiap triwulannya atau menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga koordinasi dan informasi dapat lebih ditingkat lagi.
 3. Kehadiran Kepala Daerah dalam pelaksanaan rapat-rapat pengendalian inflasi baik secara online bersama dengan Kementriaan Dalam Negeri dan rapat-rapat teknis dengan tim.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rumusan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tanjungbalai antara lain :

1. melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga serta melakukan pengawasan terhadap tempat atau gudang-gudang penyimpanan komoditas pangan untuk mencegah terjadinya kelangkaan akibat penimbunan.

Melakukan monitoring ke pasar-pasar tradisional atau pun ritel modern bersama dengan

2. tim teknis minimal setiap bulan ataupun per triwulan.
3. Melakukan perhitungan ketersediaan stok berdasarkan neraca pangan melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai sehingga ketersediaan stok selama satu bulan kedepan dapat di perkirakan.
4. Melakukan pengawasan dan monitoring LPG tabung 3 kg mulai dari tingkat SPBE, agen sampai dengan ke pangkalan serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan BBM serta kelangkaan BBM terutama Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).